

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Pangan dan perikanan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah **Kabupaten Dharmasraya Nomor X Tahun 2021 tentang Pembentukan** dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pangan dan Perikanan melaksanakan 2 (dua) bidang urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Sebagai perangkat daerah maka berkewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yang dijadikan pedoman dalam Renstra Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pangan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut sebagai Renstra Perangkat Daerah.

Didalam Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 secara yuridis berlandaskan kepada:

- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang pangan
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor XX tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor xx tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- k. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, kedudukan dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pangan dan perikanan untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan perikanan
2. Mendorong penguatan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan sebagai institusi perencanaan daerah
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda.

### 1.4. SISTEMATIKA

Perencanaan strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN** terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Resntra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya , dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** memuat permasalahan-permasalahan pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu strategis.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN** terdiri atas uraian penjabaran Visi dan Misi Bupati Dharmasraya serta strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program lima tahun mendatang.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.** Pada bagian ini dikemukakan rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.** Bagian ini memuat tentang program, kegiatan indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.** Pada bagian ini memuat tentang indicator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII. PENUTUP**

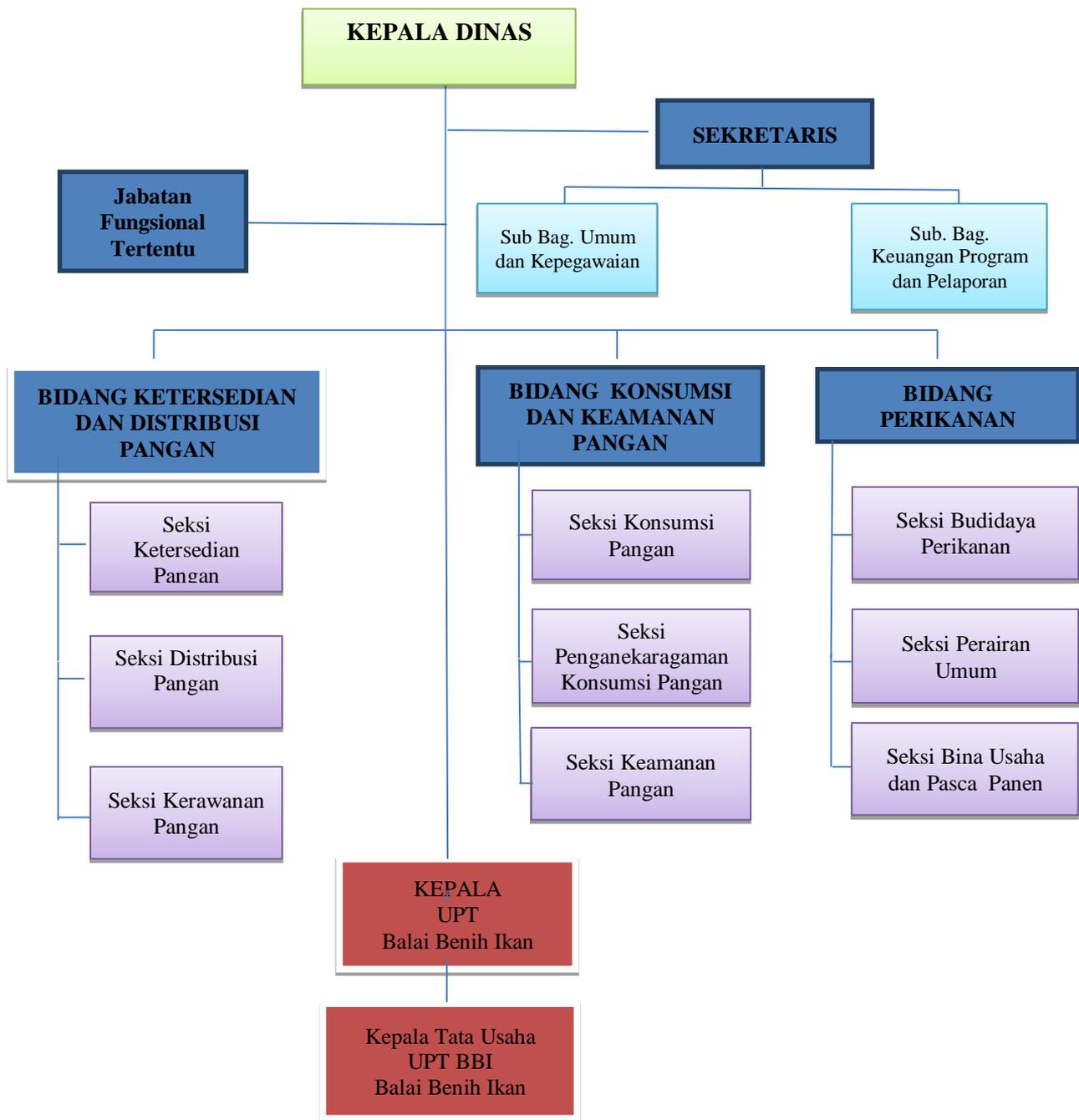
**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN DAN PERIKANAN****2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pangan dan Perikanan merupakan salah satu lembaga teknis daerah di Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pangan dan di bidang Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pangan dan Perikanan berfungsi :

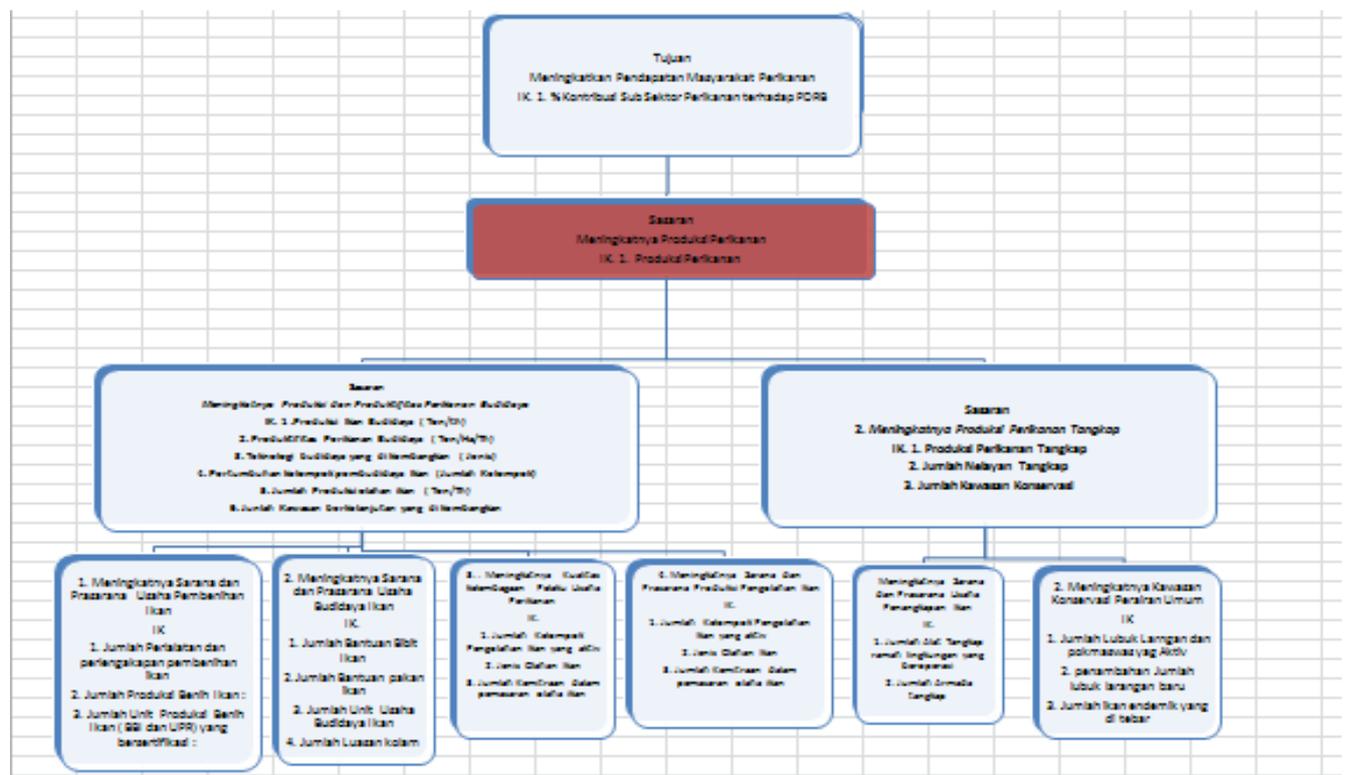
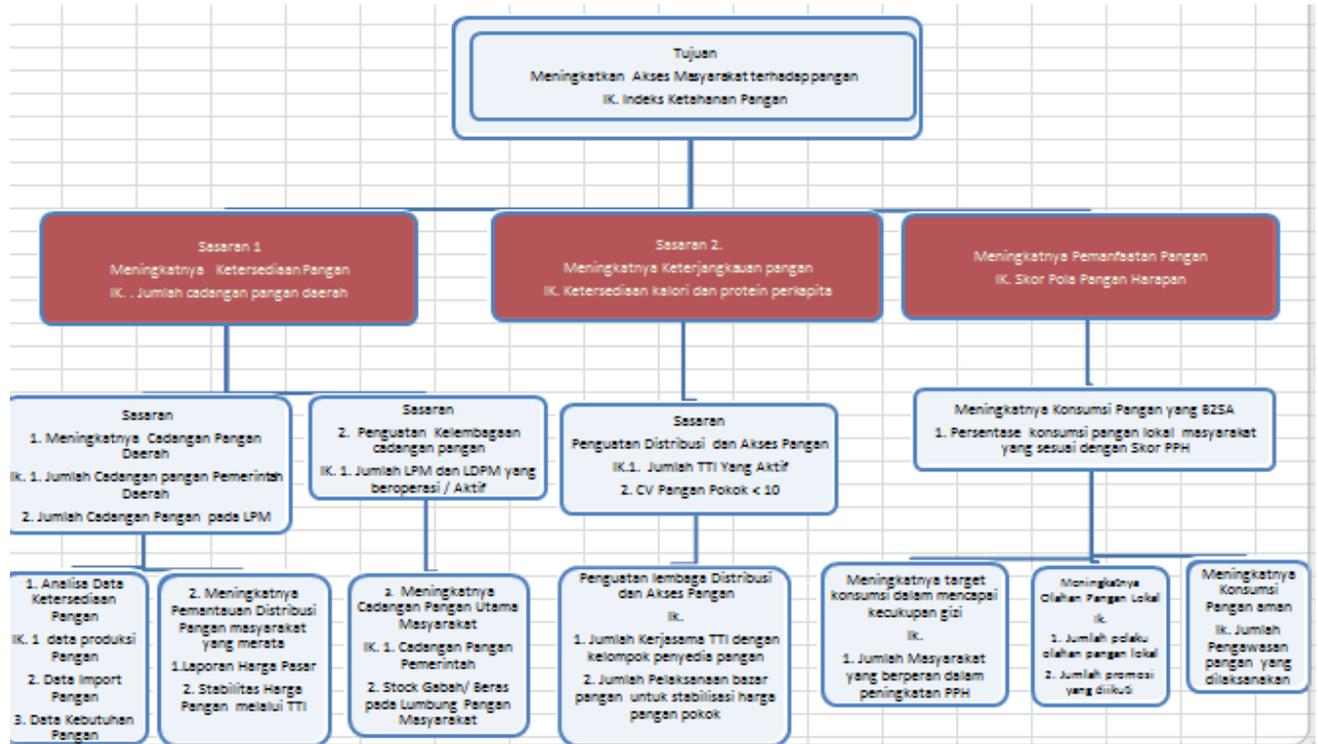
- a. Perumusan kebijakan dibidang Pangan dan bidang Perikanan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pangan dan bidang Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pangan dan bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya terdiri atas 1 bagian Sekretariat, 3 Bidang yaitu Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Distribusi dan Kerawanan Pangan dan Bidang Perikanan serta 1 Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana Bagan Struktur dibawah ini :

**Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya**



Gambar 2.2. Pohon kinerja kinerja



Dinas Pangan dan Perikanan menurunkan tugas dan fungsinya dalam pohon kinerja sebagaimana di atas. Pohon kinerja ini menjadi acuan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan.

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya di dukung oleh sumberdaya manusia yang terdiri dari disiplin keilmuan bidang pertanian, perikanan, ekonomi dan beberapa bidang ilmu lainnya dengan status kepegawaian sebagai PNS, Kontrak Pusat dan Tenaga Harian Lepas sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 : Jumlah Personil Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya menurut distribusi tempat tugas Dan Status Kepegawaian.**

No	Uraian	PNS (orang)	Kontrak( orang)	THL (orang)	Jumlah (orang)
1	Dinas Kabupaten	25	-	17	42
2	UPT Balai Benih Ikan	2	-	17	19
3	Etalase	-	-	2	2
4	Satgas Pengelola Alat Berat	-	-	7	7
5	Penyuluh Perikanan Bantu ( Kontrak Pusat)	-	3		3
6	Petugas Pemantau Harga Pasar ( THL Provinsi)			1	1
Jumlah		27	3	44	74

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa personil Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya sampai akhir tahun 2020 ini berjumlah 74 orang dengan klasifikasi 26 orang PNS (36,48%), Tenaga Kontrak Pusat sebanyak 3 orang (4%) dan THL ( Pemkab dan Pemprov) 44 orang (59,4%).

### Pegawai menurut jenis dan jenjang pendidikan

Dari segi tingkat dan jenis pendidikan personil Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, kondisinya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.2: Komposisi Personil Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan**

No.	Jenis/ Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	S-2	3	3 PNS
2.	S-1/DIV ( Perikanan / Pertanian/Umum)	45	19 PNS dan 26 Non PNS
3.	D-3 (Pangan/ Perikanan/Umum)	5	1 PNS 4 Non PNS
4.	SLTA	16	3 PNS dan 13 Non PNS
5.	SLTP	2	2 Non PNS
6.	SD	1	1 PNS
	Jumlah.	74	27 PNS dan 47 Non PNS

**Tabel 2.3: Personil Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya Berdasarkan Golongan.**

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	19
3.	Golongan II	3
4.	Golongan I	1
	<b>Jumlah</b>	28

### **Pegawai menurut Pelatihan Teknis dan Penjenjangan**

Personil Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya yang telah mengikuti pendidikan dan latihan penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut.

**Tabel 2.4: Personil Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya yang telah mengikuti Diklat Penjurangan.**

No.	Jenis Diklat Penjurangan	Kebutuhan (orang)	Tersedia (orang)	Kekurangan (orang)
1.	Diklat Pim II	1	0	1
2.	Diklat PIM – III	4	2	2
3.	Diklat PIM – IV	13	5	8

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa personil Dinas yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan untuk jabatan Struktural masih belum memenuhi sesuai kebutuhan jabatan. Untuk Jabatan Eselon II (Kepala Dinas) belum mengikuti Diklat PIM II, demikian juga untuk Jabatan Eselon III seharusnya telah mengikuti Diklat Pim-III namun dari 4 orang pejabat yang menduduki Ess III belum ada yang mengikuti Diklat PIM III. Untuk Jabatan Eselon IV terutama Kasubag, Kasi, dan kepala UPT dari 13 pejabat yang seharusnya telah mengikuti Diklat Pim-IV, namun belum ada yang mengikuti diklat tersebut.

Personil yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

**Tabel 2.5: Personil Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional**

No.	Jenis Diklat Fungsional	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pengadaan Barang & Jasa	4	
2.	Auditor CBIB Perikanan	2	
3.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	

Dari tabel diatas terlihat bahwa perlu penambahan personil untuk mengikuti pelatihan teknis fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, Auditor CBIB Perikanan dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Didalam menyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Pangan dan Perikanan di dukung oleh Sarana dan Prasarana pada tabel 6 berikut.

**Tabel 2.6 : Sarana dan Prasarana Penunjang pada Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya.**

No	Jenis Barang	Nama Barang	Keadaan	Jml	Keterangan
			B/KB/RB		
1	Alat Besar	Excavator Pompa Air	B	1 unit 3 Unit	
2	Alat Angkutan	Mobil	B	6 unit	
		Motor	B	16 unit	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Mesin Jahit, GPS dan Timbangan	B	1 Paket	
4	Alat Pertanian	Alat Panen	B	11Unit	
		Alat Penyimpanan Hasil	B	4 unit	
		Prosesing	B	16 bh	
		Alat Pasca Panen Produksi Perikanan	RB	4 bh	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Lemari Kayu, rak besi, papan nama instansi, bangku tunggu dll	B	1 Paket	
6	Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	Mikrifon, Proyektor, Faxmile	B	1 Paket	
7	Alat Laboratorium	Ph Meter, DO Meter, Pengukur kualitas air dll	B	1 Paket	
8	Komputer	Komputer Unit dan Peralatan	B	26 Unit	

		Komputer (Scanner dan Printer)			
9	Bangunan Gedung	Gedung Kantor, Gedung Laboratorium, Gedung Pabrik, gedung tempat tinggal dll	B	44 Unit	
10	Tugu. Kantor/tanda Batas	Pagar, dan jalan, jaringan irigasi	B	4 Paket	
11	Jalan dan Jembatan	Jalan Khusus	B	3 Unit	
12	Bangunan Air	Saluran Pembawa, saluran pembuang, gorong-gorong, bak penampun/Kolam dll	B	25 Unit	

### 2.2.3. Kelembagaan

Kelembagaan yang ada dalam menunjang pembangunan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Dharmasraya antara lain 109 kelompok pembudidaya ikan, 7 Kelompok Pengolah Hasil Perikanan, 10 kelompok pelaku usaha pangan local dan 139 Kelompok Wanita Tani.

### 2.2.4. Sarana Penunjang

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan didukung dengan keberadaan sarana penunjang pengembangan agribisnis Pangan dan Perikanan dari hulu sampai ke hilir. Penyediaan sarana penunjang ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Pangan dan Perikanan

dan membantu masyarakat dalam pengembangan usaha Pangan dan Perikanan. Sarana penunjang dimaksud adalah :

a. Balai Benih Ikan

Balai Benih Ikan ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan benih ikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Balai Benih Ikan yang beralamat di Tarantang Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru ini memproduksi benih ikan yaitu ikan nila, rayo, lele dan gurami dengan berbagai ukuran.

b. Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Merupakan kegiatan yang menghasilkan benih ikan yang dilakukan oleh masyarakat dan dibina oleh Dinas Pangan dan Perikanan. UPR ini memiliki standar sesuai dengan standar pembenihan sehingga benih yang dihasilkan adalah benih berkualitas. Hingga tahun 2020, UPR yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 7 unit dengan jenis benih yang dihasilkan lele dan Gurami.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan dilakukan dengan membandingkan antara target sasaran dengan capaian kinerja pada periode sebelumnya yaitu pada Tahun 2016 s/d 2021.

#### **1. Indeks Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan pangan merupakan salah satu parameter/komponen yang digunakan untuk melihat Ketahanan Pangan di suatu wilayah. Ketersediaan Pangan dipengaruhi oleh produksi rata-rata padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, produksi total sereal pokok, total populasi, produksi total sereal perkapita per hari serta rasio konsumsi normative terhadap produksi bersih perkapita. Data tersebut selanjutnya akan di analisis untuk menghasilkan satu indeks yaitu indeks Ketersediaan Pangan. Semakin tinggi indeks ketersediaan pangan, maka semakin bagus ketersediaan pangan di satu wilayah.

Tabel 2.7. Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Ketersediaan Pangan	Nilai	N/A	N/A	N/A	78,6	75,96

Capaian Indeks Ketersediaan Pangan pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh normalisasi saluran irigasi yang menjadi sumber air bagi kegiatan pertanian dalam jangka waktu yang lama sehingga aktivitas pertanian terhenti dalam beberapa siklus produksi.

## 2. Indeks Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan Pangan merupakan suatu kondisi kemudahan masyarakat dalam mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhannya. Keterjangkauan Pangan di pengaruhi oleh Distribusi, Stabilisasi Pasokan dan harga, system logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar dan informasi. Akses terhadap Pangan oleh masyarakat dapat di lihat dari indikator 1). Penduduk di bawah garis kemiskinan, 2). Penduduk di bawah garis kemiskinan, rumah tangga tanpa akses listrik serta desa tanpa akses ke jalan. Keseluruhan komponen tersebut untuk selanjutnya akan di analisis dan di olah sehingga menjadi indeks keterjangkauan. Realisasi dari sasaran kinerja indeks keterjangkauan pangan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.8. Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Keterjangkauan Pangan	Point/ Angka	N/A	N/A	N/A	88.39	89,89

Capaian Indeks keterjangkauan pangan tahun 2020 mengalami peningkatan 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh masih lancarnya distribusi pangan di daerah dan tidak terjadinya gejolak harga

yang menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pangan yang di butuhkan.

### 3. Skor pola Pangan Harapan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat di lihat dari capaian skor pola pangan harapan. Pola pangan harapan itu sendiri merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Skor pola pangan harapan adalah suatu nilai yang menggambarkan proporsi keseimbangan energy dari masyarakat untuk memenuhi keseimbangan energy dan zat gizi lainnya baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya maupun agama.

Capaian pola pangan harapan di suatu daerah di pengaruhi oleh :

a.

Tabel 2.8. Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3	Skor Pola Pangan Harapan	Point/ Angka	76,5	80,6	83	89,4	85,6

Capaian Skor pola pangan harapan masyarakat mengalami peningkatan pada 4 tahun pertama (2016-2019) akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pandemic covid 19 dan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak bebas dalam memenuhi kebutuhan pangan yang di butuhkan.

#### 4. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas/kegiatan budidaya ikan dan penangkapan ikan. Ikan itu sendiri merupakan salah satu sumber pangan yang bernilai gizi tinggi yang terdapat dalam lingkungan perairan baik perairan umum, lautan maupun dalam lingkungan budidaya.

Seiring dengan penambahan penduduk, kebutuhan masyarakat akan sumber pangan yang bergizi salah satunya ikan juga semakin meningkat. Mengharapkan ketersediaan dari hasil tangkapan, merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan dikarenakan populasi ikan di perairan umum dan lautan mengalami penurunan akibat adanya kerusakan lingkungan dan tingginya eksploitasi terhadap potensi ikan tersebut.

Oleh sebab itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan dukungan sumberdaya alam yang ada dan penerapan teknologi yang dikembangkan untuk menghasilkan ikan dari sumber lain selain hasil tangkapan yaitu budidaya. Selain itu juga dengan melakukan pengelolaan dalam pemanfaatan lingkungan perairan umum agar populasi ikan dapat terus dipertahankan sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan ikan bagi masyarakat.

Tabel 2.9. Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan	Ton	19.366	15.562	17.042	19.597	22.185

Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagai akibat dari semakin meningkatnya luasan usaha budidaya seperti kolam ikan, kolam terpal, perkembangan teknologi budidaya ikan seperti budidaya Bioflok, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam budidaya ikan dan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah sehingga Perikanan di daerah dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi melihat dukungan potensi Perikanan yang dimiliki, masih banyak hal yang dapat dikembangkan dan diusahakan dalam sektor Perikanan tersebut.

## 5. Ketersediaan Kalori dan Protein

Ketersediaan Kalori dan Protein adalah jumlah Pangan yang tersedia di pasar untuk di konsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energy/kapita/hari, protein gram/kap/hari dan lemak per kapita/hari. Perhitungan dari Ketersediaan kalori dan protein dilakukan melalui analisis neraca bahan makanan.

Ketersediaan kalori dan protein yang dianjurkan menurut PPH konsumsi yaitu sebesar 2.150 K.Kal/Kapita/hari dan protein 63 gram/kap/hari. Sedangkan menurut angka kebutuhan energy (AKE) ketersediaan yang di rekomendasikan adalah 2.400 K.kal/kap/hari.

Ketersediaan kalori dan protein dipengaruhi oleh penyediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan pangan.

Tabel 2.10. Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Kalori dan Protein						
	Kalori	K.Kal/Kap/hr	2.685	2.520	2.789	2.548	2.540
	Protein	Gram/Kap/hr		70,27	83,20	79,21	79,11

Realisasi Ketersediaan kalori dan protein /kapita/hari di Kabupaten Dharmasraya sudah melebihi rekomendasi ketersediaan kalori yaitu sebesar 2.400 K.Kal/Kap/hr dan Protein 63 gr/kap/hr. Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan pangan (food supply), penggunaan pangan (food utilization), dan ketersediaan dalam keadaan baik dalam artian masyarakat dapat mengakses pangan sesuai dengan kebutuhannya.

## 6. Persentase Cadangan Pangan Daerah terhadap kebutuhan pangan daerah

Penyediaan Cadangan pangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan. Penyediaan cadangan pangan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara (transien) yang disebabkan

gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan yang disebabkan oleh bencana alam, terganggunya transportasi dll.

Persoalan pangan tidak semata menjadi domain tanggung jawab pemerintah, namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat ini, memiliki dua sisi relevansi yakni :

**Pertama**, memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada sinergisitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah.

**Kedua**, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat.

Persentase cadangan pemerintah daerah adalah perbandingan cadangan pangan yang dimiliki oleh daerah dengan kewajiban penyediaan pangan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.10. Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Cadangan Pangan Daerah yang tersedia terhadap kebutuhan pangan daerah yang harus di	%	15	15	15	18	28

Cadangan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus disediakan masih sangat kecil yaitu kisaran 15

- 28%. Hal ini terjadi karena keterbatasan alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dimana CPPD tersebut hanya ada pada Tahun 2020 sebanyak 7,75 Ton dan sisanya merupakan cadangan pangan masyarakat (LPM) sebanyak 20 Ton pada tahun 2020. Pada Tahun 2016 s.d 2019, cadangan pangan daerah hanya bersumber dari cadangan pangan masyarakat yang berada di Lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 LPM. Sementara kewajiban penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPPD) hingga tahun 2020 adalah sebesar 99,63 Ton.

Tabel. 8  
Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Dharmasraya

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Ketersediaan Pangan	90	-	-	N/A	N/A	N/A	78,6	80	N/A	N/A	N/A	78,6	75,96	N/A	N/A	N/A	100	94,95
2.	Indeks Keterjangkauan Pangan	60	-	-	N/A	N/A	N/A	88,39	90	N/A	NA	NA	88,39	89,89	N/A	N/A	N/A	100	99,87
3.	Ketersediaan Energi Protein perkapita	90	-	-	n/a	2.400	2.450	2.455	2.460	n/a	2,685	2.520	2.789	2.540	Na	111	102	113	103
4.	Penguatan Cadangan Pangan	90	-	-	10	12	15	18	20	10	13	15	18.01	27,75	100	108	100	100	138
5.	Skor Pola Pangan Harapan	90	-	-	77	80,6	84	86	88	76,5	80,6	83	89,4	85,6	102	100	98,8	103,9	97,2
8.	Produksi Perikanan (ton)	-			19.798	15.360	16.816	19.203	21.606	19.366	15.562	17.042	19.597	22.185	97,8	101,3	101,3	102	102,6

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

### **2.4.1. Tantangan**

Pembangunan 5 tahun kedepan dihadapkan pada perubahan kebijakan- kebijakan, adanya pandemi covid 19 yang mempengaruhi semua lini kehidupan, perubahan lingkungan, keterbatasan infra struktur dan pendanaan yang dimiliki yang tentu berpengaruh terhadap sektor Pangan dan Perikanan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Infrastruktur Pangan dan Perikanan yang di miliki  
Infrastruktur pangan yang diperlukan adalah ketersediaan lumbung pangan, Lantaijemur dan Toko Tani Indonesia (TTI) center belum tersedia di daerah. Hal ini mempengaruhi terhadap distribusi dan akses pangan. Sedangkan infrastruktur perikanan yang dimiliki telah berusia lama sehingga banyak yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kelembagaan dan Sumberdaya  
Kelembagaan Pangan dan Perikanan adalah Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dan Kelompok pengolahan Pangan local. Keberadaan kelembagaan tersebut mengalami perkembangan yang lambat sehingga kelembagaan kelompok tidak mengalami peningkatan kelas. Sedangkan untuk sumberdaya anggota kelompok juga terbatas dalam penguasaan teknologi usaha yang dilakukan. Dalam hal sumberdaya manusia petugas teknis Pangan dan Perikanan juga terbatas dalam hal jumlah dan kemampuan petugas.
3. Permodalan untuk usaha  
Usaha Pangan dan terutama Perikanan merupakan usaha yang membutuhkan modal yang cukup besar. Kemampuan kelompok yang terbatas menghambat usaha yang dilakukan sehingga potensi usaha yang dimiliki oleh kelompok tidak termanfaatkan secara optimal. Akses permodalan yang disediakan pemerintah melalui subsidi bunga

diperbankan belum termanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha Pangan dan Perikanan. sehingga usaha yang dilakukan masih menggunakan modal seadanya dan mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait.

4. Distribusi dan Pemasaran Produk Pangan dan perikanan  
Distribusi Pangan dan Perikanan di seluruh wilayah Dharmasraya belum merata dimana ada beberapa komoditi pangan yang masih sulit ditemukan oleh masyarakat, ataupun jika ada jumlahnya masih sedikit. Selain itu stabilitas harga pangan mengalami gejolak harga pada waktu-waktu tertentu sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk mengkases komoditi pangan tersebut.
5. Peningkatan Jumlah penduduk  
Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu menyebabkan kebutuhan pangan juga akan meningkat. Oleh sebab itu, penguatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan perlu terus dilakukan.
6. Kebiasaan masyarakat terhadap pola konsumsi pangan selama ini, menyebabkan kualitas konsumsi pangan harapan masih rendah untuk beberapa komoditi terutama pangan local sehingga skor pola pangan harapan masyarakat belum mencapai angka yang direkomendasikan.
7. Potensi lahan Perikanan dan Daya dukung sumber air dari irigasi teknis yang belum terkelola dengan optimal sehingga belum mampu untuk menggenjot produksi Perikanan.

Melihat kepada tantangan yang ada tersebut diatas, maka peluang yang akan dimanfaatkan adalah:

1. Misi Kepala Daerah yaitu Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing dimana salah satu potensi ekonomi daerah yaitu dari sector pangan dan perikanan;
2. Kesadaran masyarakat akan pangan yang bergizi makin meningkat;
3. Kebutuhan pangan dan ikan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga penyediaan pangan harus ditingkatkan;
4. Letak geografis daerah pada posisi silang tiga provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, serta 7 Kabupaten (Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Kuantan Singingi, Bungo, tebi dan Kerinci) dinilai sangat

strategis karena merupakan pusat pertumbuhan baru dalam kerangka kerja sama regional IMS-GT, Dengan demikian posisi Kabupaten Dharmasraya yang berperan sebagai pintu gerbang akan lebih mudah mengakses pusat pertumbuhan tersebut yang diharapkan sebagai pasar dari berbagai komoditi yang dihasil daerah ini;

5. Tersedia kelembagaan Petani dan pembudidaya ikan

Kelembagaan yang ada dalam menunjang pembangunan dibidang Pangan dan Perikanan di Kabupaten Dharmasraya antara lain kelompok pembudidaya ikan, KTNA, Unit Pengembangan Perikanan (UPP), Koperasi Unit Desa, Koperasi berbasis komoditi Pangan dan Perikanan, Koperasi serba usaha yang tersebar hampir merata di seluruh Kecamatan dan Nagari;

6. Tersedia kredit program dan pemodalannya

Perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha Pangan dan Perikanan dari segi permodalan saat ini cukup besar. Tersedia bermacam skim kredit dengan bunga lunak dari perbankan, maupun beragam kredit dari permodal lain seperti CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan swasta, investor perorangan dari perantau, maupun kredit dari pemerintah seperti PUAP, KMN, UMKM dan lain sebagainya. Tinggal lagi bagaimana petani dan pembudidaya ikan memanfaatkan berbagai kredit dimaksud;

7. Dukungan sumberdaya air yang berlimbah dari jaringan irigasi dan ketersediaan lahan yang luas yang dapat dikembangkan untuk Pangan dan Perikanan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel 3.1 Indikator Kinerja dan Permasalahan yang di hadapi

No	Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan/Rencana Aksi
1	Indeks ketersediaan pangan	Tinggi	<p>Terbatasnya infrastruktur ketersediaan pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>kurangnya kemampuan daerah dalam peningkatan ketersediaan pangan yang beragam karena ketergantungan pada 1 (satu) komoditi penyokong keersediaan yaitu Padi Sawah sedangkan komoditi pangan lainnya masih sedikit serta ketersediaan cadangan pangan pemerintah masih rendah</b></li> <li>Komoditi pangan local lainnya masih sedikit</li> <li>Ketersediaan cadangan pangan pemerintah masih rendah</li> </ol>	<p>Faktor Penentu keberhasilan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peranan pemerintah dalam pemberdayaan lumbung paangan masyarakat sebagai penyedia pangan di tingkat masyarakat</li> <li>Pemanfaatan komoditi pangan local lainnya untuk mengganti sumber pangan padi sawah ( jagung, ubi, sukun dll)</li> <li>Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah</li> </ol> <p>Rencana Aksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penumbuhan Lumbung pangan Masyarakat</li> <li>Peningkatan produksi komoditi pangan local</li> <li>Penguatan kelembagaan dan cadangan pangan pemerintah daerah</li> <li>Penguatan Nagari Mandiri Pangan</li> </ol>
2	Indeks Keterjangkauan Pangan	Tinggi	<p>Resiko Pandemi Coids 19 yang terus berlanjut akan mempengaruhi indeks keterjangkauan pangan karena penurunan daya beli masyarakat</p>	<p>Faktor penentu keberhasilan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan peran pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan keluarga</li> <li>Pemberian bantuan social kepada masyarakat yang terdamak pandemic covid 19</li> </ol> <p>Rencana Aksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan stabilisasi harga pangan pokok melalui bazar dan operasi pasar</li> <li>Penguatan usaha pangan masyarakat melalui Toko Tani Indonesia</li> <li>Penmantauan dan penyediaan analisa harga pangan pokok</li> </ol>

3	Skor Pola Pangan Harapan		<p>4. Kebiasaan / pola makan masyarakat yang belum sesuai dengan pola pangan harapan</p> <p>5. rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).</p> <p>6. Rendahnya pemenuhan pangan rumah tangga untuk komoditi tertentu akibat harga yang relative tinggi bagi rumah tangga menengah ke bawah</p> <p>7. Masih rendahnya pemanfaatan pangan local untuk konsumsi pangan masyarakat</p>	<p><b>Faktor Penentu keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. uas nya potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk penyediaan pangan tingkat rumah tangga</li> <li>2. ukungan sumberdaya masyarakat yang dapat di berdayakan dalam penyediaan pangan tingkat rumah tangga</li> <li>3. eningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang B2SA</li> <li>4. erkembangan teknologi budidaya pangan dalam lahan terbatas</li> </ol> <p><b>Rencana Aksi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengetahuan masyarakat dalam konsumsi pangan yang B2SA</li> <li>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan kebutuhan pangan rumah tangga</li> <li>3. Perngembangan teknologi Budidaya pangan dalam lingkungan terbatas</li> <li>4. Peningkatan pemanfaatan pangan local untuk pemenuhan konsumsi pangan beragam</li> </ol>
4	Produksi Perikanan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi yang dihasilkan masih rendah dari potensi yang di miliki</li> <li>2. Jaringan pemasaran ikan hasil budidaya masyarakat belum memiliki nilai tawar yang tinggi dan masih di kuasai oleh pasokan dari luar</li> <li>3. Infrastruktur perikanan untuk menunjang kegiatan perikanan banyak yang mengalami kerusakan akibat usia nya yang sudah tua</li> <li>4. Masih banyak teknologi budidaya yang berpotensi untuk di kembangkan di daerah yang belum di kuasai oleh pembudidaya ikan</li> <li>5. Modal terbatas yang di miliki oleh pembudidaya ikan</li> </ol>	<p><b>Faktor penentu keberhasilan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi luas lahan dan sumberdaya air yang besar</li> <li>2. Animo masyaralat untuk berbudiya ikan tinggi</li> <li>3. Tersedianya Skim pembiayaan dengan bunga bersubsidi dari pemerintah</li> <li>4. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat akan ikan dari masa ke masa</li> <li>5. Semakin banyak nya teknologi perikanan yang di kembangkan</li> </ol> <p><b>Rencana Aksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan budidaya ikan secara intensive</li> <li>2. Revitalisasi kolam budidaya yang tidak termanfaatkan</li> <li>3. Pengembangn teknologi budidaya untuk menggenjot produksi dan menekan cost produksi</li> <li>4. Peningkatan kapasitas SDM Perikanan</li> <li>5. Pemanfaatan lembaga keuangan mikro/ perbankan</li> </ol>

				<p>sebagai sumber permodalan usaha budidaya</p> <p><b>6.</b> Fasilitasi pemasaran hasil produksi perikanan ( ikan segar dan olahan)</p> <p><b>7.</b> Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dan tangkap</p> <p><b>8.</b> Peningkatan kawasan perikanan yang lestari dan berkelanjutan</p>
5	Penguatan Cadangan Pangan daerah		<p>1. Masih rendahnya cadangan pangan pemerintah (CPPD) yang tersedia di bandingkan dengan jumlah yang harus tersedia/di penuhi oleh pemerintah daerah</p>	<p>Faktor Penentu keberhasilan</p> <p>1. Pemenuhan Amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan</p> <p>Rencana Aksi</p> <p>1. Penyediaan cadangan pangan pemerintah sesuai dengan undang-undang</p>
6	Ketersediaan Kalori dan Protein		<p>1. Dominanya proporsi konsumsi beras sebagai sumber energy oleh masyarakat</p> <p>2. Pemanfaatan pangan local non beras sebagai sumber energy belum maksimal</p>	<p>Faktor Penentu</p> <p>1. Pangan local tersedia di tengah masyarakat</p> <p>2. Menigkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan local non beras</p> <p>Rencana Aksi</p> <p>1. Peningkatan Pengolahan Pangan Lokal sebagai sumber energi</p>

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya terpilih Periode 2021 - 2026 adalah :

***“ Menuju Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya ”***

Pernyataan visi di atas setidaknya mengandung makna yang menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan tentang masa depan Kabupaten Dharmasraya yaitu:

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 6 misi yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dari uraian Visi dan Misi sebagai mana di atas, maka Dinas Pangan dan Perikanan berkontribusi dalam pencapaian atas misi 3 yaitu: **“Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing”**. dengan sasaran **“Mengurangi Kemiskinan”** untuk sector Pangan dan **“Meningkatkan pendapatan masyarakat** untuk sector Perikanan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ketidak mampuan ini dapat disebabkan oleh ketiadaan pangan yang dibutuhkan, ketidak terjangkau dikarenakan harga yang mahal ataupun kondisi pangan yang tidak sehat/aman untuk di konsumsi.

Oleh sebab itu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan akan mengurangi kemiskinan terhadap pangan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan ini dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan distribusi pangan sehingga pangan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Potensi perikanan di Kabupaten Dharmasraya adalah perikanan darat dan perairan umum. Dukungan sumberdaya yang ada meliputi ketersediaan lahan, sumber air, sarana transportasi yang memadai, letak/posisi kabupaten yang strategis menyebabkan sector perikanan dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pembangunan perikanan yang telah dilakukan oleh pemerintah sangat membantu terhadap ekonomi masyarakat. Usaha budidaya ikan yang telah berjalan memberikan kontribusi terhadap Produk domestic regional bruto daerah.

### 3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROPINSI

#### 3.2.1. Kementerian Pertanian

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 2020-2024 Kementerian Pertanian

No	Tujuan strategis	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan
2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3	Meningkatkan kualitas SDM dan Prsarana Kementerian pertanian	Terwujudnya Reformasi kementerian pertanian

Berdasarkan tabel di atas, maka tujuan dan sasaran strategis Kementerian pertanian 2021-2026 “Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan” dan “Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing pertanian” selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 dengan tujuan “Meningkatkan Akses masyarakat terhadap pangan” dengan sasaran 1). Meningkatkan Ketersediaan Pangan, 2). Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dan 3). Meningkatkan pemanfaatan pangan.

#### 3.3.2. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024

No	Tujuan strategis	Sasaran Strategis
1.	Peningkatan daya saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan	1. Kesejahteraan masyarakat KP meningkat 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan perikanan meningkat 3. Sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan
2.	Peningkatan Kontribusi ekonomi sector kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional	4. Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan perikanan meningkat 5. Hasil Riset dan Inovasi di manfaatkan
3.	Peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	6. Tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan bertanggung jawab 7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
4.	Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP	

Terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021-2026 yaitu pada tujuan strategis “Peningkatan kontribusi ekonomi sektir kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional” dan “peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran strategis“ 1). Kesejahteraan masyarakat KP meningkat, 2). Ekonomi sector kelautan dan perikanan meningkat, dan 3). sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran strategis ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 dengan tujuan yaitu “Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Perikanan” dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya produksi perikanan”.

### 3.3.3. Dinas Pangan Sumatera Barat.

Telaahan atas renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat belum dapat dilakukan karena ketika dilakukan penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Pangan Provinsi belum tersedia.

Tabel 3.5. Tujuan dan sasaran Strategis Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ indikator sasaran
1			

### 3.3.4. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat

Tabel 3.6. Tujuan dan sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ indikator sasaran
1			

Telaahan atas renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat belum dapat dilakukan karena ketika dilakukan penyusunan renstra Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi belum tersedia.

#### **3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan hasil dari kajian lingkungan Hidup Strategis, Sektor Pangan berkontribusi terhadap pencapaian atas tujuan pembangunan berkelanjutan dengan indicator “ tanpa kelaparan”.

Berdasarkan kondisi tersebut maka di susun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan urusan pangan dan perikanan

No	Indikator TPB	Arah Kebijakan	Indikasi Program	Sinkronisasi Permendagri 90/2019	Ket
1.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	- Meningkatkan ketersediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan ketersediaan dan stock pangan</li> <li>- Pengembangan SDM petugas / analisis ketahanan pangan dan pelaku usaha pangan</li> </ul>	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat program penanganan kerawanan pangan	
		- Meningkatkan Keterjangkauan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem Logistik dan Distribusi Pangan</li> <li>- Pengembangan Infrastruktur logistic dan Distribusi Pangan</li> </ul>	program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan program penanganan kerawanan pangan	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan Stabilitas Harga Pangan</li> <li>- Peningkatan Akses terhadap pasar dan informasi</li> </ul>	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, bergizi, seimbang dan aman</li> <li>- Peningkatan Penganekagaraman pangan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaraman konsumsi pangan</li> <li>- Pengembangan SDM petugas Analisis pangan</li> </ul>	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
			- Peningkatan Pangan aman	program pengawasan keamanan pangan	

Rekomendasi arah kebijakan yang disampaikan adalah 1). Meningkatkan pengendalian erosi melalui peningkatan tutupan vegetasi, 2). Mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah domestik. (IPAL Komunal) 3.) Mengendalikan kegiatan pertambangan di Sungai 4.) Meningkatkan pengawasan pembuangan limbah industry dan 5.) Memperkuat tata Kelola pengendalian pencemaran dan implementasi regulasi.

Isu Strategis Alih fungsi lahan yang disebabkan oleh Peningkatan pemukiman Pengembangan infrastruktur jalan dan Gedung Pemanfaatan hutan untuk perkebunan. Alih fungsi lahan terutama lahan pertanian akan mengancam kepada penyediaan pangan masyarakat. Apabila ini berkelanjutan maka dikhawatirkan di masa yang akan datang produksi pangan yang pada saat sekarang surplus akan menjadi defisit. Hal ini tentu akan mengancam kepada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di masa yang akan datang.

Rekomendasi tim KLHS atas alih fungsi lahan ini adalah Mengembangkan pemukiman hemat lahan (rumah susun sewa), Mengembangkan rekayasa pembangunan infrastruktur (jalan layang), mengembangkan pengendalian pemanfaatan ruang, memperkuat implementasi regulasi pemanfaatan ruang dan mengembangkan LP2B dan mengembangkan insentif implementasi regulasi.

## **PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berangkat dari permasalahan yang ditemui dalam pembangunan Pangan dan Perikanan serta dari hasil telaahan beberapa kebijakan tingkat atas, dirumuskan isu isu strategis dalam pembangunan Pangan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya sector Pangan dan Perikanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan peningkatan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan penerapan teknologi untuk peningkatan produksi.
3. Meningkatkan kompetensi stakeholder pembangunan pangan dan perikanan.

4. Meningkatkan infrastruktur ketahanan pangan dan sarana prasarana perikanan dalam rangka mewujudkan kemudahan akses masyarakat terhadap pangan.
5. Meningkatkan nilai jual produk pangan dan perikanan melalui peningkatan kualitas produk.
6. Membangun jaringan pemasaran produk pangan dan perikanan secara digital.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

**Tabel 4.2. Tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah pelayanan perangkat daerah**

**Misi : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**

**Tujuan RPJMD : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing**

**Sasaran RPJMD : 1. Pertumbuhan PDRB**

**2. Mengurangi Kemiskinan**

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal 2020	Target Kinerja Tahun ke					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akses masyarakat terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan pangan	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	%	27,75	33	43	53	63	73	83
			Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/ hari	K.Kal/ kap/ hr	2.540	2.550	2.555	2.560	2.565	2.570	2.575
			Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan		85,6	87	87,5	88	88,5	89	89,5
2	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat perikanan	Persentase kenaikan PDRB sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	22.185	25,509	26,784	28,123	29,529	31,000	32,550
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pangan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Perikan	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan	Nilai IKM Dinas Pangan dan Perikanan	B							

## BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pangan dan Perikanan merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	<b>Meningkatnya Akses masyarakat terhadap pangan</b>	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	<b>Meningkatkan Cadangan pangan Daerah</b>	1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
				2. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat
				1. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat
				2. Penguatan Kelembagaan lumbung Pangan Masyarakat
		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	<b>Meningkatkan intervensi distribusi Pangan</b>	1. stabilitas harga pangan pokok masyarakat
				2. Stabilitas Distribusi pangan pokok masyarakat
				1. Penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat
				2. Pengentasan daerah rawan pangan
				3. Pengembangan Nagari Mandiri Pangan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, bergizi dan seimbang	1. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal
				2. Peningkatan Pola Konsumsi Masyarakat
			Meningkatkan Keamanan Pangan masyarakat	Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan
2	<b>Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Perikanan</b>	Meningkatnya Nilai Tukar Produksi Perikanan	Optimalisasi Pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya perikanan daerah	1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya dan Tangkap
				2. Peningkatan Kemampuan pelaku usaha Perikanan
				3. Peningkatan Teknologi Pengelolaan sumberdaya Perikanan
				4. Peningkatan nilai tambah hasil produksi perikanan yang berdaya saing
			Meningkatnya kawasan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	1. Peningkatan Kawasan budidaya perikanan yang terintegrasi
				2. Peningkatan kawasan perairan umum yang lestari
				3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan perikanan
3	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pangan dan Perikanan</b>	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan	Meningkatkan pemahaman dan penguasaan personil atas pelayanan dinas pangan dan Perikanan	1. Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya dan Tangkap
				2. Peningkatan Kemampuan pelaku usaha Perikanan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				3. Peningkatan Teknologi Pengelolaan sumberdaya Perikanan
				4. Peningkatan nilai tambah hasil produksi perikanan yang berdaya saing
4	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan</b>	Meningkatnya Perencanaan, Pelapora dan Evaluasi Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan	Optimalisasi Pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya perikanan daerah	1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya dan Tangkap
				2 . Peningkatan Kemampuan pelaku usaha Perikanan
				3. Peningkatan Teknologi Pengelolaan sumberdaya Perikanan
				4. Peningkatan nilai tambah hasil produksi perikanan yang berdaya saing
			Meningkatnya kawasan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	1. Peningkatan Kawasan budidaya perikanan yang terintegrasi
				2. Penigkatan kawasan perairan umum yang lestari
				3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan perikanan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 memuat nama program, nama kegiatan dan nama sub kegiatan, Sasaran dan Indikator sasaran serta pendanaan yang dibutuhkan dalam 5 tahun kedepan diharapkan mampu untuk menjawab semua target kinerja yang akan di capai, mengatasi permasalahan yang ada sehingga fungsi pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan dapat terlaksana dengan baik. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pembangunan Pangan dan Perikanan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat dari sector Pangan dan Perikanan adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dan meningkatkan nilai tambah produksi perikanan.

Untuk lebih rincinya indikator kinerja SKPD per tahun selama kurun waktu 2021-2026 terdapat pada berikut :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target Capaian Kinrja Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2025
1	Persentase Cadangan Pangan Daerah terhadap kebutuhan pangan daerah	%	27,75	33	43	53	63	73	83
2	Ketersediaan Kalori dan Protein/ kapita/hari	K.Kal/Kap/hr	2.540	2.550	2.555	2.560	2.565	2.570	2.575
3	Skor Pola Pangan Harapan ( %)	Nilai	85,6	87	87,5	88	88,5	89	89,5
4	Produksi Perikanan	Ton	22.185	25.509	26,784	28.123	29.529	31.000	32.550
5	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Perikanan	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
6	Nilai IKM Dinas Pangan dan Perikanan	Nilai	B						

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kendala yang ada (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya.

Partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur pada Dinas Pangan dan Perikanan sangat diperlukan dalam agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dicapai dan program/kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Pulau Punjung,        2021  
KEPALA DINAS

PURWANTO, M,Pd  
NIP. 19620805 198308 1 001